RAKYAT KALBAR

JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGUST | SEP | OKT | NOV | DES | 2016 | HAL: 09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

TOTAL ADD RP509 JUTA, DITRANSFER HANYA RP411 JUTA

Rp98 Juta Raib, Tapi Rp45 Juta Diributkan

SINTANG-RK. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Manis Raya SP 1 SKPH mendesak Kepala Desa (Kades) segera mengembalikan Anggaran Dana Desa (ADD) sebesar Rp45 juta. Jika tidak dikembali segera mungkin maka, maka ADD tahap kedua terancam tidak bisa dicairkan.

"Kita minta segera dikembalikan uang ADD yang diduga disalahgunakan oleh Kepala Desa Manis Raya SP 1 SKPH itu," kata Siana, Ketua BPD Desa Mânis Raya SP 1 SKPH, Kamis (22/9).

Dikatakan Siana, ADD tahap pertama dari pemerintah pusat telah cair pada Juli 2016 lalu. Namun sangat disayangkan, dana yang seharusnya diperuntukkan untuk pembangunan dan kegiatan masyarakat, raib begitu saja.

■ Halaman 15

"Seharusnya, pencairan ADD tahap pertama kita terima Rp509 juta. Tetapi yang ditransfer ke rekening bendahara desa hanya Rp411 juta. Kemudian uang Rp411 juta itu pun langsung diambil oleh Kepala Desa dan dimasukkan ke rekening pribadinya. Dari Rp411 juta tersebut yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp45 juta. Makanya kita minta Kepala Desa segera kembalikan uang tersebut," tegas Siana tanpa menyebutkan kenapa dari Rp509 juta hanya ditransfer Rp411 juta saja dan kemana larinya Rp98 juta.

Siana mengatakan, jika melihat aturan yang ada, kepala desa tidak memiliki kewenangan penuh untuk menyimpan dana ADD di rekening pribadinya. Mestinya bendahara desa yang harus menyimpan uang tersebut, guna melakukan pembangunan, kegiatan masyarakat dan pembayaran honor perangkat desa.

"Jangankan untuk pembangunan dan kegiatan masyarakat. Honor kami saja sudah tiga bulan tidak dibayar. Saat ditanya kepada bendahara desa, mereka hanya bilang kalau uang ADD sudah minus," kesal Siana.

Menurut Siana, kondisi ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Pasalnya, pada pencairan ADD tahap kedua nantinya, Desa Manis Raya SP 1 SKPH terancam tidak cair. Sebab, syarat pencairan ADD tahap kedua, mengacu pada pertanggungjawaban penggunaan ADD tahap pertama yang sesuai dengan SPJ. "Bagaimana kita mau bikin SPJ, kalau dananya sudah tidak ada," ucapnya.

Kepala desa harus bertanggungjawab penuh. Sebab, ADD merupakan uang negara yang diperuntukan untuk melakukan kegiatan -kegiatan di desa. "Itu uang negara yang diperuntukan untuk membangun dan melakukan kegiatan masyarakat. Intinya, ADD bukan uang pribadi kepala desa," tegasnya.

Siana mengaku telah mempertanyakan persoalan dana ADD yang diduga hilang sebesar Rp45 juta itu kepada kepala desa. Namun, Kades hanya menjawab bahwa uang ADD itu akan segera diganti dalam waktu dekat.

"Kita tanya uang itu kemana? Kades hanya bilang akan digantinya tanpa merinci dipergunakan untuk apa uang sebesar Rp45 juta tersebut," kata dia.

Siana mengatakan, dirinya akan segera melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan Manis Raya, terkait adanya penyalahgunaan dana ADD yang dilakukan oleh Kepala Desa Manis Raya SP 1 SKPH. "Kita akan minta bantuan pihak kecamatan untuk menyelesaikan persoalan ini," tuturnya.

Kepala Desa Manis Raya SP 1 SKPH, Karjak saat hendak dikonfirmasi via telepon selulernya Kamis (22/9) sekitar pukul 17.20, tidak bisa dihubungi. Pasalnya, nomor telepon Pak Kades tidak aktif. Kemudian Rakyat Kalbar mencaoba melakukan panggilan telepon seluler terhadap Sekertaris Desa Manis Raya SP 1 SKPH, Pingsun. Sangat disayangkan yang bersangkutan sedang sibuk menghadiri hajatan pernikahan dan bisa dikonfirmasi, Jumat (23/9). (***adx***)